BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara 1090 17′ 30″ – 1090 40′ 30″ BT dan 80 52′ 30″ – 70 20′ 11″ LS.

Dari Semarang (Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten ini berjarak kira-kira 135 Km ke arah barat, atau jika ditempuh dengan kendaraan darat memakan waktu lebih kurang 2-3 jam. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 1.115,30 km2. Wilayah ini di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Dengan demikian Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan.

Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian Utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 m di atas permukaan laut dan bagian Selatan merupakan dataran tinggi dan pengunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten

Pemalang ini dilintasi dua buah sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai yang subur.

Secara administratif Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang, kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Warungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami.

Kabupaten Pemalang di kenal pula mempunyai banyak produk unggulan seperta Sentra tenun ATBM, konveksi, kerajinan kulit ular, dan sapu glagah, dan masih banyak potensi yang bisa di gali di bumi Pemalang tersebut.

Selain itu pula Pemalang mempunyai keragaman seni budaya yang masih di lestarikan diantaranya sintren, kuntulan, dsb, dan untuk kuliner Pemalang mempunyai bebrapa makanan khas seperti Grombyang, sate Loso, Lontong Dekem, Tahu Campur, Apem comal, khamir arab dsb.

Fasilitas kesehatan dilayani oleh 1 rumah sakit umum daerah dan 3 rumah sakit umum swasta 22 puskesmas induk 65 puskesmas pembantu dan 22 unit puskesmas keliling dengan 103 orang dokter umum 21 orang dokter gigi, 24 dokter spesialis, 473 orang bidan dan 542 perawat, dilengkapi dengan 55 apotek dan 9 toko obat yang kesemuanya siap membantu perawatan kesehatan masyarakat Pemalang.Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Kabupaten Pemalang terus menggiatkan proses pendidikan yang

terpadu dan berkesinambungan difasilitasi dengan 350 Sekolah Taman Kanak-kanak, 2 buah Sekolah Luar Biasa, 868 SD/MI, 161 SMP/MTS, 37 SMA/MA, 29 SMK dan 3 buah perguruan tinggi menjadikan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mandiri.

Layanan jasa perbankan di Kabupaten Pemalang dilayani oleh 4 buah Bank milik pemerintah BRI, BNI, Bank Mandiri dan Bank Jateng dan 7 buah bank swasta nasional seperti BCA, Bank Muamalat, Bank Danamon, CIMB NIAGA, Bank Mega, Bank Sinar Mas dan BTPN serta bank milik pemerintah daerah sebanyak 3 buah yaitu BPR, BKK, dan Bank Pasar.

Wilayah kabupaten Pemalang mendapatkan suplai energi listrik dari satu gardu induk yang telah mampu menjangkau 100% kebutuhan energy listrik perkotaan maupun pedesaan.

Kebutuhan akan air bersih dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum dengan memanfaatkan sumber air gunung. Sementara itu sungai, telaga dan sumur galian tetap dimanfaatkan karena sumber airnya yang sangat melimpah bersih dan segar.

Kabupaten Pemalang memiliki jalan Negara sepanjang 32,43 km, jalan Propinsi 99,52 km dan jalan Kabupaten sepanjang 651,97 km dengan ketersediaan armada transportasi yang melayani transportasi antar kota antar propinsi maupun dalam propinsi. Untuk melayani kebutuhan komunikasi tersedia jaringan komunikasi dengan kapasitas sentral 8.596 ssp dengan jaringan internet dan telepon yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Pemalang sehingga akan memudahkan kebutuhan komunikasi.

Kandungan sumber daya alam yang paling potensial di Kabupaten Pemalang khususnya pemalang bagian selatan yang terletak di lereng Gunung Slamet adalah berupa Tambang Diorit, Kaolin, Batu Gamping, dan Batu Marmer.

Pasar Sayur dan Buah kini telah berdiri di Pemalang dan menjadi sub terminal agrobisnis kecamatan penghasil komoditi sayur dan buah juga dimaksudkan sebagai pusat bisnis ekonomi masyarakat antar dan inter daerah.

Kegiatan ekonomi rakyat yang menjadi andalan di Kabupaten Pemalang adalah industri kecil pakaian jadi atau konveksi dan salah satunya adalah masuknya investor dari Jepang dengan mendirikan Pabrik Garment untuk memenuhi kebutuhan ekspor tekstil Indonesia. Hasil industri tesktil dan tenun meliputi sarung tenun, sarung palekat, kaos kaki dan goyor. Sementara itu kerajinan gerabah, sapu glagah, kerajinan kulit ular juga telah mampu menembus pasaran ekspor ke singapura dan Malaysia.

Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan. Dan menyimpan potensi sumber daya alam dengan panorama keindahan alam yang memikat serta sumber daya manusia yang sangat besar menjadikan Kabupaten Pemalang sebagai sebuah potensi laksana permata yang terpendam yang siap untuk digali.

Topograf alamnya yang berupa dataran pantai , dataran rendah, dataran tinggi serta daerah pegunungan sehingga menjadikan tanah di Kabupaten Pemalang memiliki tanah yang subur dengan panorama yang asri

dan indah sangat tepat untuk berwisata maupun melakukan kegiatan-kegiatan pecinta alam.

Ternak seperti Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Domba, Kerbau, Kuda, Ayam Buras, Ayam Petelur, Ayam Pedaging dan Itik, Burung Puyuh, Burung Dara sangat cocok dikembangkan di Kabupaten ini.

Menyadari besarnya potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pemalang mengembangkan budidaya ikan dan biota air laut. Selain juga berupa perikanan darat berupa Tambak, Kolam, Karamba, dan budidaya biota air tawar.

Dengan areal tambak seluas 1.728 hektar komoditas yang dikembangkan berupa Bandeng, Udang Windu dan Kepiting Soka. Sedangkan produk perikanan laut yang mempunyai nilai jual tinggi diantaranya berupa Ikan Teri Nasi, Udang, Rajungan dan Bawal Putih.

Sektor pertanian dengan lahan sawah seluas 38.617 hektar dan lahan kering 23.813 hektar masih menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten ini, komoditas yang menonjol untuk tanaman pangan adalah Padi, Ketela Pohon dan Jagung, Sayur-sayuran, Bawang Merah, Cabai Merah dan Ketimun. Sedangkan produksi buah-buahan adalah Nanas Batu, Pisang dan Mangga.

Salah satu andalan Kabupaten Pemalang adalah “Teh” dengan produksi sebesar 927,53 ton, dengan luas area perkebunan sebesar 15.713 hektar. Produksi perkebunan andalan lainnya adalah Tebu, Kelapa Sayur,

Glagah Arjuna, Cengkeh, Kopi, Tembakau, Kakao, Lada, Nilam, dan Karet tumbuh subur di Kabupaten ini.

Berbagai kategori hutan tersedia di Kabupaten ini seperti Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Wisata, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Bakau dan Hutan Rakyat. Hasil kehutanan antara lain Kayu Jati, Kayu Albasia, Kayu Mahoni dan juga Getah Pinus.

Kesenian daerah berupa Wayang, Kesenian Krangkeng, Kuda Lumping dan Sintren. Dilengkapi dengan sarana akomodasi hotel serta rumah makan yang menyajikan banyak makanan khas seperti Sate Loso, Nasi Grombyang, Kepiting Gemes, Apem Comal, Kamir Pemalang dan aneka masakan hasil laut yang pastinya akan memanjakan lidah anda para pecinta wisata kuliner. Sementara itu pasar buah khas Pemalang serta pusat grosir tenun, batik dan kerajinan memberikan banyak pilihan buah tangan khas Pemalang.

Kabupaten Pemalang memiliki sejumlah obyek wisata yang memliki prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan. Beberapa jenis obyek wisata yang dimiliki terdiri dari obyek pegunungan, pantai, air terjun, maupun obyek wisata buatan.

Pantai Widuri, Widuri Waterpark, Pantai Blendung, Pantai Joko Tingkir, Gunung Gajah, Goa Gunung Wangi, Curug Sibedil, Curung Barong, Bukit Mendelem, Telaga Rengganis, Telaga Silating, Kolam Renang Banyumudal Moga, Mata Air Cepaka Wulung, Air Terjun Sipendok, Air Terjun Bengkawah, Air Terjun Lawang dan juga Agropolitan Waliksarimadu.

Dengan jumlah penduduk 1.262.013 jiwa, kehidupan masyarakatnya yang religius dan toleran, pekerja keras dan memiliki semangat bergotong royong yang masih cukup kuat memberikan modal sosial yang kokoh bagi masyarakat Pemalang untuk melangkah lebih maju.

Terwujudnya masyarakat Pemalang yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan berakhlak mulia dalam kesatuan wilayah Kabupaten Pemalang yang ikhlas, indah komunikatif hijau lancar aman dan sehat merupakan visi Kabupaten Pemalang.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Pemalang yang berakhlak mulia, sehat sejahtera, berkesadaran hukum dan demokratis dalam kesatuan wilayah Kabupaten Pemalang yang IKHLAS (Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman, dan Sehat).

b. Misi

1) Melaksanakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin
2) Meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara murah dan merata
3) Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi
4) Meningkatkan taraf hidup penduduk miskin
5) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkesinambungan

6) Meningkatkan kinerja dan pelayanan yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima
7) Mengupayakan perwujudan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah yang bertumpu pada kemampuan dan potensi lokal.
8) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
9) Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta pelaksanaan sistem hukum yang menjamin tegaknya pelaksanaan supremasi hukum
10) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara harmonis dalam rangka saling menghormati dengan semangat kekeluargaan.

3. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang

Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Adanya stuktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Pemalang terdiri dari:

a. Staf Ahli
b. 16 Dinas Pemerintah Kabupaten
c. Kecamatan dan Kelurahan
d. Sekertariat Daerah
e. DPRD

f. Perusahaan Daerah

g. Lembaga Teknis Daerah

4. Uraian Tugas SKPD Pemerintah Kabupaten Pemalang

Tugas wewenang dan tanggung jawab merupakan fungsi dari setiap bagian di dalam SKPD Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dapat membedakan antara satu bagian dengan bagian lain. Berikut adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap bagian:

a. Kepala dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina dan mengendalikan, mengkoordinasi dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembentukan pada masing-masing dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana program dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas
2) Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
3) Membina bawahan dilingkungan dinas dengan cara memberikan reward dan punishment untuk meningkatkan produktifitas kerja.

4) Memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset daya aperatur pengelolaan keuangan daerah.
5) Menyelenggarakan monitoring pembinaan pelaksanaaan penetapan kebijakan pengelolaan dan pengawasan invstasi dan aset daerah.

b. Sekertariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretaritan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan, serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang masing-masing dinas.
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekertaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
d. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekertaris bagian lingkup keuangan dan program melakukan aktifitas pengkoordinasian dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (IPPD)

e. Bidang Anggara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas yang menjadi kewenangan di bidang keuangan dan aset lingkup anggaran, serta menyusun rencana program di bidang anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
f. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas yang menjadi kewenangan di bidang keuangan aset lingkup perbendaharaan, serta mengkaji bahan kebijakan teknis dibidang belanja langsung dan tidak langsung serta pembiayaan dan manajemen kas sebagian bahan rumusan kebijakan.
g. Bidang Pemberdayaan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkorrdinasi penyelenggaraan pengelolaan barang miliki daerah yang ada di masing-masing SKPD
h. Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok mengkaji dan mengkoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup akuntansi dan pendapatan dan pembiayaan, akuntansi beanja serta pencatat dan pelaporan sebagai bahan rumusan kebijakan

5. Aktivitas Dinas

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan serta pelayanan keagamaan bagi seluruh masyarakat.
b. Mengupayakan peningkatan kegiatan perekonomian kota berbasiskan potensi daerah

c. Mendorong peningkatan integrasi dan ketahanan sosial masyarakat serta peningkatan rasa kepedulian sosial masyarakat.

d. Mengupayakan perluasan dan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana kota serta pengembangan aktivitas kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

e. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan kota.

f. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan potensi pembiayaan kota

6. Lokasi Penelitian

Gambar 4.1.
Peta Kabupaten Pemalang

B. Karakteristik Responden

1. Rincian penyebaran kuesioner

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara menyebar kuesioner sebanyak 150 kuesioner kepada SKPD Kabupaten

Pemalang. Masing-masing SKPD diberikan 5 kuesioner dari total 30 SKPD. Berikut adalah rincian dari penyebaran kuesioner :

TABEL 4.1.
Rincian Penyebaran Kuisioner

No	Daftar Klarifikasi	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	150
2	Kuesioner yang dikembalikan	92
3	Kuesioner yang tidak kembali	58
4	Kuesioner yang dapat diolah	92

Sumber: Data primer diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan sebanyak 150 kuesioner. Berdasarkan uraian di atas, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 58 dan kuesioner yang dapat diolah sebanyak 92. Dengan rincian Sehingga, berdasarkan data tersebut tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) dalam penelitian ini yaitu 65,3%.

2. Rincian Pengembalian Kuesioner

Berikut adalah rincian kuesioner yang di peroleh dari masing – masing SKPD di Kabupaten Pemalang.

TABEL 4.2.
RINCIAN PENGEMBALIAN KUESIONER

No.	Daftar SKPD	Kuesioner yang kembali
1	Badan Kepegawaian Daerah	4
2	Badan Penanggulangan Bencana	2
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5
4	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3
5	BAPPEDA	3
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
7	Dinas Kesehatan	2
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	5
9	Dinas Koperasi, Umum, Perindustrian & Perdaganga	3
10	Dinas Lingkungan Hidup	2
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	2
14	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu 1 Pintu	3

No.	Daftar SKPD	Kuesioner yang kembali
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3
16	Dinas Perhubungan	2
17	Dinas Perikanan	3
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2
19	Dinas Pertanian	4
20	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	4
21	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Kb Pp & Pa	3
22	Dinas Tenaga Kerja	4
23	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat	3
24	Kecamatan Ampelgading	2
25	Kecamatan Comal	2
26	Kecamatan Pemalang	4
27	Kecamatan Petarukan	2
28	Kecamatan Taman	3
29	RSUD Dr. M Ashari	4
30	Satpol-PP	3
JUMLAH		92

3. Karakteristik responden berdasarkan usia

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan usia, berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

TABEL 4.3.
Karakteristik Responden Bedasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	21-30 Tahun	16	17.4
2	31-40 Tahun	47	51.1
3	41-50 Tahun	29	31.5
Total		**92**	**100**

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 92 responden dalam penelitian ini responden yang paling banyak adalah responden yang berusia 31-40 tahun, yaitu sebanyak 47 orang dengan persentase 51,1%. Sedangkan kategori usia 21-30 tahun memiliki jumlah paling sedikit yaitu sebanyak 16

orang dengan persentase 17,4%. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas memiliki usia 31-40 tahun.

4. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

TABEL 4.4.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	47	51,1
2	Perempuan	45	48,9
Total		**92**	**100**

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 92 responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 47 orang dengan persentase 51,1%. Sedangkan untuk perempuan memiliki jumlah sebanyak 45 orang dengan persentase 48,9%. Dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak dalam penelitian ini adalah responden laki-laki.

5. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan pendidikan, berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

TABEL 4.5.
Krakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Diploma	23	25
2	S1	61	66,3
3	S2	8	8,7
Total		**92**	**100**

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 92 responden dalam penelitian ini yang paling banyak adalah responden dengan pendidikan terkahir S1 jumlahnya sebanyak 61 orang dengan persentase 66,3%. Sedangkan responden yang paling sedikit adalah responden dengan tingkat pendidikan S2 dengan jumlah 8 orang dan persentasenya 8,7%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan S1.

6. Karkateristik responden berdasarkan lama bekerja

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan lama bekerja, berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

TABEL 4.6.
Krakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase (%)
1	1-2 tahun	12	13
2	3-4 tahun	23	25
3	5-6 tahun	38	41,3
4	>6 tahun	19	20,7
Total		**92**	**100**

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 92 responden dalam penelitian ini, responden yang paling banyak adalah responden yang telah bekerja selama 5-6 tahun, yaitu sebanyak 38 orang dengan persentase 41,3%. Sedangkan untuk responden yang paling sedikit yaitu yang bekerja selama 1-2 tahun dengan persentase 13%.

C. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data yang diperoleh dari lapangan. Hasil uji statistik deskriptif Uji deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.7.
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Median Teoritis	Mean	Std. Deviation
Sumber Daya Manusia	92	4-16	10	12,91	1,298
Pemanfaatan Teknoligi Informasi	92	3-12	7,5	9,50	1,144
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	92	11-44	27,5	37,67	2,292
Keterandalan	92	4-16	10	13,64	1,023
Ketepatwaktuan	92	6-24	15	20,02	2,339

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat kisaran teoritis, median teoritis, mean dan *standard deviation*. Kisaran teoritis merupakan perkiraan nilai minimum dan maksimum total skor jawaban dari setiap variabel. Nilai kisaran teoritis diperoleh dengan mengkalikan total pertanyaan dalam kuesioner dengan nilai jawaban terendah. Median teoritis merupakan nilai tengah total skor jawaban dari setiap variabel.

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari 92 responden variabel sumber daya manusia memiliki nilai *mean* lebih besar dari median teoritis (12,91 > 10), hal ini menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia sudah dalam kategori tinggi. Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai *mean* lebih besar dari median teoritis (9,50 > 7,5), hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan pemanfaatan teknologi informasi sudah dalam kategori tinggi. Hasil statistik deskriptif variabel

sistem pengendalian intern pemerintah memiliki nilai *mean* lebih besar dari median teoritis (37,67 > 27,5), hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan tentang variabel sistem pengendalian intern pemerintah sudah dalam kategori tinggi. Hasil statistik deskriptif variabel keterandalan memiliki nilai *mean* lebih besar dari median teoritis (13,64 > 10), hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan tentang variabel keterandalan sudah dalam kategori tinggi. Hasil statistik deskriptif variabel ketepatwaktuan memiliki nilai *mean* lebih besar dari median teoritis (20,02 > 15), hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan tentang variabel ketepatwaktuan sudah dalam kategori tinggi.

D. Uji Kualitas Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji tingkat valid atau tidaknya ikuisioner penelitian dengan cara melihat nilai *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara lain nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila nilai *Pearson Correlation* < 0,05 maka item pernyataan dalam instrument kuesioner tersebut dapat dikatakan valid (Ghozali, 2011).

TABEL 4.8.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	*Sig.*	α = 0,05	Keterangan
Sumber Daya Manusia	SDM1	0,000	0,05	Valid
	SDM2	0,000	0,05	Valid
	SDM3	0,000	0,05	Valid
	SDM4	0,000	0,05	Valid
Pemanfaatan Teknoligi Informasi	PTI1	0,000	0,05	Valid
	PTI2	0,011	0,05	Valid
	PTI3	0,002	0,05	Valid
Sistem	SPI1	0,012	0,05	Valid

Variabel	Pertanyaan	*Sig.*	α = 0,05	Keterangan
Pengendalian Intern Pemerintah	SPI2	0,003	0,05	Valid
	SPI3	0,046	0,05	Valid
	SPI4	0,000	0,05	Valid
	SPI5	0,005	0,05	Valid
	SPI6	0,024	0,05	Valid
	SPI7	0,075	0,05	Valid
	SPI8	0,042	0,05	Valid
	SPI9	0,001	0,05	Valid
	SPI10	0,000	0,05	Valid
	SPI11	0,000	0,05	Valid
Keterandalan	KD1	0,000	0,05	Valid
	KD2	0,000	0,05	Valid
	KD3	0,000	0,05	Valid
	KD4	0,000	0,05	Valid
Ketepatwaktuan	KW1	0,000	0,05	Valid
	KW2	0,001	0,05	Valid
	KW3	0,000	0,05	Valid
	KW4	0,000	0,05	Valid
	KW5	0,000	0,05	Valid
	KW6	0,000	0,05	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel di atas menunjukan bahwa hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam setiap variabel memiliki nilai signifikansil lebih kecil dari 0,05 sebagai nilai batas suatu item kuesioner dikatakan valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini seluruhnya dapat dikatakan valid dan dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun berkali-kali diuji. Hasil uji reabilitas dengan bantuan SPSS akan menghasilkan *Cronbach Alpha* untuk melihat tingkat

reliabilitas dari setiap instrumen kuesioner yang digunakan. Suatu instrumen diakatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar atau sama dengan 0,60 (Sekaran, 2006).

TABEL 4.9.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach Alpha*	Nilai Kritis	Keterangan
Sumber Daya Manusia	0,825	0,6	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,740	0,6	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,704	0,6	Reliabel
Keterandalan	0,872	0,6	Reliabel
Ketepatwaktuan	0,708	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai dari *Cronbach Alpha* untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,6 yang berarti seluruh instrumen dalam penelitian ini reliabel atau handal dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

E. Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi mensyaratkan untuk dilakukan pengujian asumsi klasik, pengujian ini digunakan untuk memastikan bahwa persamaan regresi telah terbebas dari multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi (Nany, 2003). Uji asumsi klasik sendiri meliputi :

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi yang disusun ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang tidak bebas multikolinieritas dapat mengakibatkan nilai-nilai t yang tidak signifikan, arah yang salah pada

koefisien-koefisien regresi (Nany, 2003). Model regresi tidak mengandung multikolinieritas jika nilai VIF < 10 dan *Tolerance*> 0,1.

TABEL 4.10.
Hasil Uji Multikolinieritas Model Regresi 1

Model		Collinearity Statistics		Kesimpulan
		Tolerance	VIF	
1	Sumber Daya Manusia	0,719	1,392	Tidak Terjadi
	Pemanfaatan Teknologi I.	0,483	2,116	Tidak Terjadi
	Sistem Pengendalian I.P	0,103	9,688	Tidak Terjadi
Dependent Variable: Keterandalan				

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai tolerance dari seluruh variabel independen memiliki nilai lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi 1.

TABEL 4.11.
Hasil Uji Multikolinieritas Model Regresi 2

Model		Collinearity Statistics		Kesimpulan
		Tolerance	VIF	
1	Sumber Daya Manusia	0,633	1,579	Tidak Terjadi
	Pemanfaatan Teknologi I.	0,451	2,216	Tidak Terjadi
	Sistem Pengendalian I.P	0,103	9,688	Tidak Terjadi
Dependent Variable: Ketepatwaktuan				

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai tolerance dari seluruh variabel independen memiliki nilai lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi 2.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi terdapat ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain konstan, maka dapat disebut sebagai homoskedastisitas. Tetapi apabila varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tidak konstan, maka disebut heteroskedastisitas (Nany, 2003). Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, penelitian yang dilakukan oleh (Nany, 2003) uji yang digunakan adalah uji glejser. Model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas jika nilai sig > 0,05.

TABEL 4.12.
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Regresi 1

Model		T	Sig.	
1	Sumber Daya Manusia	-0,577	0,565	Tidak Terjadi
	Pemanfaatan Teknologi I.	1,473	0,143	Tidak Terjadi
	Sistem Pengendalian I.P	1,261	0,211	Tidak Terjadi
Dependent Variable: Keterandalan				

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.15 di atas terlihat bahwa nilai sig. Pada masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi 1 pada penelitian ini.

TABEL 4.13.
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Regresi 2

Model		T	Sig.	
1	Sumber Daya Manusia	1,284	0,202	Tidak Terjadi
	Pemanfaatan Teknologi I.	-0,462	0,645	Tidak Terjadi
	Sistem Pengendalian I.P	-0,774	0,441	Tidak Terjadi
Dependent Variable: Ketepatwaktuan				

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai sig. Pada masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi 2 pada penelitian ini.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (periode sebelumnya) (Nany, 2003). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin Watson*. Model regresi tidak mengandung autokorelasi jika dL < dw < dU

TABEL 4.14.
Hasil Uji Autokorelasi

Model	**R**	**R Square**	**Adjusted R Square**	**Std. Error of the Estimate**	**Durbin-Watson**
1	0,900	0,810	0,804	0,453	1,713
2	0,935	0,875	0,871	0,841	1,693

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa nilai *Durbin Watson* model regresi 1 sebesar 1,713. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan tabel *Durbin Watson* dengan menggunakan nilai signifikansi 5% dengan jumlah sampel (n) 92 dan jumlah variabel (k) 4 yaitu: untuk batas bawah (dL) 1,571 dan untuk batas atas (dU) 1,752. Nilai *Durbin-Watson* 1,713 berada antara nilai dL dan dU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi 1 pada penelitian ini. . Selain itu, untuk nilai *Durbin Watson* model regresi 2 sebesar 1,693. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan tabel *Durbin*

Watson dengan menggunakan nilai signifikansi 5% dengan jumlah sampel (n) 92 dan jumlah variabel independen (k) 4 yaitu: untuk batas bawah (dL) 1,571 dan untuk batas atas (dU) 1,752. Nilai *Durbin-Watson* 1,693 berada antara nilai dL dan dU, maka dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi 1 pada penelitian ini.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi yang normal (Nany, 2003). Pada penelitian ini uji Kolmogorov Smirnov digunakan untuk menguji normalitas data.

TABEL 4.15.
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual Model Regresi 1	Unstandardized Residual Model Regresi 2
N		92	92
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000000	0,0000000
	Std. Deviation	3,74937066	1,72823922
Most Extreme Differences	Absolute	0,098	0,75
	Positive	0,070	0,051
	Negative	-0,098	-0,075
Kolmogorov-Smirnov Z		0,725	0,920
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,670	0,366

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,670 dan 0,366. Berdasarkan hasil tersebut nilai *Asymp. Sig*-nya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

F. Analisis Data dan Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengaruh sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2) dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) terhadap keterandalan (Y_1) dan ketepatwaktuan (Y_2) pada SKPD di Kabupaten Pemalang dapat dilihat menggunakan analisis regresi linier berganda berikut:

- **Model regresi 1**
  $Y_1 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$
- **Model regresi 2**
  $Y_2 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$

Dimana: Y_1 = keterandalan
Y_2 = ketepatwaktuan
a = konstanta
b_i = koefisien regresi
X_i = variabel independen

Hasil pengolahan analisis regresi berganda dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu model regresi 1 dengan keterandalan sebagai variabel dependen dan model regresi 2 dengan ketepatwaktuan sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini data diolah menggunakan softeare SPSS 20.0. hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

TABEL 4.16.
Hasil Perhitungan Model Regresi 1

Model		*Unstandardized Coefficient*		*Standardized Coeffecient*	t	Sig.
		B	*Std.error*	*Beta*		
1	(*constant*)	2,445	1,140		2,145	0,035
	SDM (X_1)	0,481	0,120	0,610	4,020	0,000
	PTI (X_2)	0,014	0,062	0,015	0,223	0,824
	SPI (X_3)	0,129	0,064	0,289	2,000	0,049
Dependent Variable: Keterandalan						

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel. di atas hasil perhitungan spss diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$Y_1 = 2,445 + 0,610X_1 + 0,015X_2 + 0,289X_3$

Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia (X_1) dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel keterandalan (Y_1). Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan (Y_1). Nilai koefisien regresi dari sumber daya manusia (X_1) dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) memiliki arah yang positif atau searah, artinya ketika sumber daya manusia (X_1) dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) meningkat maka variabel keterandalan (Y_1) akan meningkat juga.

TABEL 4.17.
Hasil Perhitungan Model Regresi 2

Model		*Unstandardized Coefficient*		*Standardized Coeffecient*	t	Sig.
		B	*Std. error*	*Beta*		
1	(*constant*)	-14,043	2,117		-6,635	0,000
	SDM (X_1)	0,080	0,222	0,045	0,361	0,719
	PTI (X_2)	0,286	0,115	0,140	2,489	0,015
	SPI (X_3)	0,805	0,120	0,789	6,723	0,000
Dependent Variable: Ketepatwaktuan						

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel di atas hasil perhitungan spss diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$Y_1 = -14,043 + 0,045X_1 + 0,140X_2 + 0,789X_3$

Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel ketepatwaktuan

(Y_2). Variabel sumber daya manusia (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan (Y_2). Nilai koefisien regresi dari pemanfaatan teknologi informasi (X_2) dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) memiliki arah yang positif atau searah, artinya ketika pemanfaatan teknologi informasi (X_2) dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) meningkat maka variabel ketepatwaktuan (Y_2) akan meningkat juga.

a. Uji F

Peneliti menggunakan uji F. Pada dasarnya Uji Statistik F ini menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka H_1 diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan. Ini berarti bahwa secara simultan ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji statistik F pada penelitian ini :

TABEL 4.18.
Hasil Uji F Model Regresi 1

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig,
1	Regression	77,106	3	25,702	125,260	0,000
	Residual	18,057	88	0,205		
	Total	95,163	91			

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan F hitung model regresi 1 sebesar 125,260 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai sig. F hitung lebih kecil dari 0,05 maka secara simultan sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan

teknologi informasi (X_2) dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan.

TABEL 4.19.
Hasil Uji F Model Regresi 2

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig,
1	Regression	435,715	3	145,238	205,346	0,000
	Residual	62,241	88	0,707		
	Total	497,957	91			

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan F hitung model regresi 2 sebesar 205,346 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai sig. F hitung lebih kecil dari 0,05 maka secara simultan sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2) dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) berpengaruh signifikan positif dan terhadap ketepatwaktuan.

b. Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi t hitung dengan *alpha* = 5%. Jika nilai sig. < 0,05, maka artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji t pada penelitian ini berdasarkan tabel 4.16 dan 4.17:

1) Pengaruh sumber daya manusia terhadap keterandalan

   Hasil pengujian pada Tabel 4.16 diperoleh nilai koefesien t variabel sumber daya manusia sebesar 4,020 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan

terhadap keterandalan. Maka, dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1a (H_{1a}) penelitian ini diterima.

2) Pengaruh sumber daya manusia terhadap ketepatwaktuan

Hasil pengujian pada Tabel 4.17 diperoleh nilai koefesien t variabel sumber daya manusia sebesar 0,361 dengan signifikansi sebesar 0,719 > 0,05. Artinya sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan. Maka, dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1b (H_{1b}) penelitian ini ditolak.

3) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan

Hasil pengujian pada Tabel 4.16 diperoleh nilai koefesien t variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,223 dengan signifikansi sebesar 0,824 > 0,05. Artinya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan. Maka, dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2a (H_{2a}) penelitian ini diterima.

4) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatwaktuan

Hasil pengujian pada Tabel 4.17 diperoleh nilai koefesien t variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 2,489 dengan signifikansi sebesar 0015, < 0,05. Artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan. Maka, dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2b (H_{2b}) penelitian ini diterima.Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap keterandalan

5) Hasil pengujian pada Tabel 4.16 diperoleh nilai koefesien t variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 2,000 dengan signifikansi sebesar 0,0,049 < 0,05. Artinya sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan. Maka, dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3a (H_{3a}) penelitian ini diterima.

6) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap ketepatwaktuan.

   Hasil pengujian pada Tabel 4.17 diperoleh nilai koefesien t variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 6,723 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan. Maka, dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3b (H_{3b}) penelitian ini diterima.

TABEL 4.20.
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H_{1a}	Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.	**Diterima**
H_{1b}	Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Ketepatwaktuaan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.	**Ditolak**
H_{2a}	Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.	**Ditolak**

Kode	Hipotesis	Hasil
H_{2b}	Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Ketepatwaktuaan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.	**Diterima**
H_{3a}	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.	**Diterima**
H_{3b}	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpegaruh Positif Terhadap Ketepatwaktuaan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.	**Diterima**

c. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Dalam penelitian ini nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nila *adjusted R Square* dari model regresi, karena *adjusted R Square* dapat naik turun jika suatu variabel bebas ditambahkan dalam model (Ghozali, 2011).

TABEL 4.20.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	**Adjusted R Square**	Std. Error of the Estimate
1	0,900	0,810	**0,804**	0,453
2	0,935	0,875	**0,871**	0,841

Sumber: Data primer diolah, 2017

Hasil perhitungan pada tabel 4.23 Diperoleh nilai *Adjusted R square* model regresi 1 sebesar 0,804. Artinya, variabel sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2) dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) mampu menjelaskan variasi variabel keterandalan (Y_1)

sebesar 80,4%. Sedangkan sisanya sebesar 19,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian.

Sedangkan untuk nilai *Adjusted R square* model regresi 2 sebesar 0,871. Artinya, variabel sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2) dan sistem pengendalian intern pemerintah (X_3) mampu menjelaskan variasi variabel ketepatwaktuan (Y_2) sebesar 87,1%. Sedangkan sisanya sebesar 12,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian.

G. Pembahasan

1. Pengaruh sumber daya manusia terhadap keterandalan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh psoitif dan signifikan terhdap keterandalan laporan keuangan daerah Kabupaten Pemalang. Hasil pengujian regresi menunjukkan koefesien regresi positif hal ini membuktikan bahwa semakin baik sumber daya manusia maka akan semakin baik pula tingkat tingkat keterandalan pelaporan keuangannya.

Sumber daya manusia yang dinilai dalam hal ini yaitu kapasitasnya atau kemampuan individu untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efesien (Widyaningrum & Rahmawati, 2010). Kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of resonsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia pada SKPD di Kabupaten

Pemalang dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam pelaporan keuangan daerah. Latar pendidikan pegawai, keterampilan, serta pelatihan-pelatihan merupakan salah satu faktor yang meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Hasil penelitian Desmiyawati (2014) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah Riau. Penelitian Diawati (2015) menjelaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikant erhadap keterandalan laporan keuangan Kota Surakarta. Hasil penelitian ini juga mendukung Winidyaningrum dan Ramawati (2010) yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya manusia pada bagian akuntansi/ tata usaha keuangan daerah sudah mencukupi baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya.

2. Pengaruh sumber daya manusia terhadap ketepatwaktuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhdap ketepatwaktuan laporan keuangan daerah Kabupaten Pemalang. Hasil temuan empiris dari penelitian ini menunjukkan rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsi serta hambatan dalam pengolahan data berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harusnya diselesaikan, salah satunya penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatwaktuan.

Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksankannya, maka akan menimbulkan hambatan seperti ketidak tepatan waktu pelaporan keuangan.

Rosalin dan Kawedar (2011) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikant terhadap keteptan waktu pelaporan keuangan pada Badan layanan Umum. Rosalin dan Kawedar (2011) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kemampuan seorang staf pelaporan keuangan harus ikut serta dalam pelatihan-pelatihan tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan demin meningkatkan *timelinesee*. Semakin besar pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan keahlian seorang staf, maka dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya dengan baik dan lebih cepat. Hasil penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Winidiyaningrum dan Rahmawati (2010) menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap *timelinsess* (ketepatwaktuan) pelaporan keuangan daerah. Hasil ini juga mendukung penelitian Rachmawati (2014) kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Boyolali.

3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhdap keterandalan laporan keuangan daerah Kabupaten Pemalang. Hasil ini mengindikasi bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah belum memberikan hasil

yang diharapkan terutama dalam keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena peralatan dan software pendukung yang masih sering mengalami kendala di samping sumber daya manusia yang perlu dilakukan pelatihan untuk menigkatakan keahlian dan profesionalitas tugas.

Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa untuk penggunaan teknologi informasi pada sektor publik terutama Kabupaten Pemalang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kemampuan yang terbatas dari sumber daya manusia yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Pemalang. Komputer yang ada hanya merupakan alat bantu kerja terpisah antara satu fungsi dan fungsi lain dalam pemerintah daerah Kabupaten Pemalang. Teknologi informasi yang ada di Kabupaten Pemalang belum merupakan kesatuan sistem yang dapat terintegrasi dalam satu perintah server. Sehingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara manual tanpa ada software atau jaringan tertentu yang menyatukannya. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan teknologi informasi dalam penelitian ini tidak berpengruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Desmiyawati (2014) dengan hasil penelitian bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Rachmawati (2014) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signfikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Boyolali. Hasil

penelitian Diawati (2015) juga menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah pada SKPD di Kota Surakarta.

4. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatwaktuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan daerah Kabupaten Pemalang. Hasil pengujian regresi menunjukkan koefesien regresi positif hal ini membuktikan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi akan semakin baik pula tingkat tingkat ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer, internet, dan teknoligi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan serta kesiapan laporan dan output lannya lebih tepat waktu. Pada penelitian ini SKPD pada Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses transaksi dan pengolahan data laporan keuangan dikarenakan prosesnya lebih cepat dalam suatu kegiatan SKPD.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Momuat (2016) yang memberikan bukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap variabel ketepatwaktuan pelaporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan barang Miliki Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian lain yang

mendukung hasil ini yaitu Desmiyanti (2014), Rosalin dan Kawedar (2012) dan Trisaputra (2013) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan.

5. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap keterandalan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan daerah Kabupaten Pemalang. Hasil pengujian regresi menunjukkan koefesien regresi positif hal ini membuktikan bahwa apabila semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah akan semakin baik pula tingkat keterandalan pelaporan keuangan.

Aktivitas pengendalian dilakukan pemerintah daerah merupakan sebuah sistem yang dibentuk agar sebuah aktivitas yang ada dalam dinas dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses pengendalian intern yang baik diharapkan dapat meningkatkan proses penyusunan laporan keuangan yang lebih efektif serta memiliki tingkatan keterandalan yang tinggi. Pengendalian intern yang baik mampu mencegah kesalahan dan kecurangan dalam penyusunan pelaporan keuangan.

Pemanfaatan telonologi informasi selain memiliki dampak positif juga memiliki memiliki dampak negatif. Risiko-risiko yang sebelumnya tidak pernah ada seperti berkembangnya para hacker dan cracker yang merupakan salah satu contoh isu yang terkait dengan pelanggaraan etika penggunaan

teknologi informasi. Pengendalian intern pemerintaha harus ditingkatkan agar keamanan data pemerintah dapat terjaga dengan baik. Jika data tersebut dapat diubah oleh pihak lain yang tidak memiliki otorisasi maka akan berbahaya bagi pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan data dalam organisasi pemerintah akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi banyak pihak yang terkait dengan pelaporan keuangan. Kesalahan atau sabotase terhadap data pemerintahan dapat berdampak pada angka yang tidak relevan dalam pelaoran keuangan. Keberadaan sistem pengendalian intern yang memadai dapat mencegah kesalahan karena *human error* serta sabotase dari pihak di luar organisasi pemerintah. Dengan demikian keberadaan sistem pengendalian intern dapat meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Rachmawati (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian Desmiyawati (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada SKPD di Riau. Rosalin dan Kawedar (2012) menunjukkan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern mempengaruhi keandalan secara signifiakan dalam pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum di Kota Semarang.

Hasil penelitian ini juga mendukung Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transpransi, dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah Gubernur/ Bupati/ Walikota mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. Untuk itu, perlu dirancang suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasianm pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan, sehingga dapat disusun menjadi laporan keungan. Hasil penelitian ini mendukung apa yang ada di dalam PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dilakukannya sistem pengendalian intern adalah untuk mewujudkan keterandalan pelaporan keuangan. Sistem pengendalian intern pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efekivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan, sehingga untuk terus menjaga keterandalan laporan keuangan kerja auditor intern pemerintah dalam hal ini BPKP dan inspektorat untuk terus ditingkatkan lagi agar dapat menunjang terwujudnya pelaporan keuangan pemerintah daerah yang handal.

6. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap ketepatwaktuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan daerah Kabupaten Pemalang. Hasil pengujian regresi

menunjukkan koefesien regresi positif hal ini membuktikan bahwa apabila semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah akan semakin baik pula tingkat ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan.

Ketepatwaktuan penyampaian pelaporan keuangan akan berkaitan dengan penggunaan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Karena ketepatwaktuan menjadi hal yang penting maka hendaknya sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai sifat preventif terhadap kesalahan, detektif terhadap kesalan dan melakukan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi. Apabila sistem pengendalian intern pemerintah meningkat maka diharapkan aspek ketepatwaktuan pelaporan keuangan juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintahan. Menurut PP 60/80, salah satu komponen pengendalian intern dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) adalah komunikasi dan informasi. Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2014) yang melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah.